

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melakukan berbagai strategi kebijakan desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatkan pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi merupakan bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu (Etika et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu Negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal (Arina et al., 2019).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan adanya peningkatan pelayanan pada sektor publik, dengan adanya peningkatan pada layanan di sektor publik bisa menambah daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Faktor yang paling mendukung dalam menaikkan tingkat kepercayaan publik pada investasi kapital yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (Al Qomariah et al., 2022)

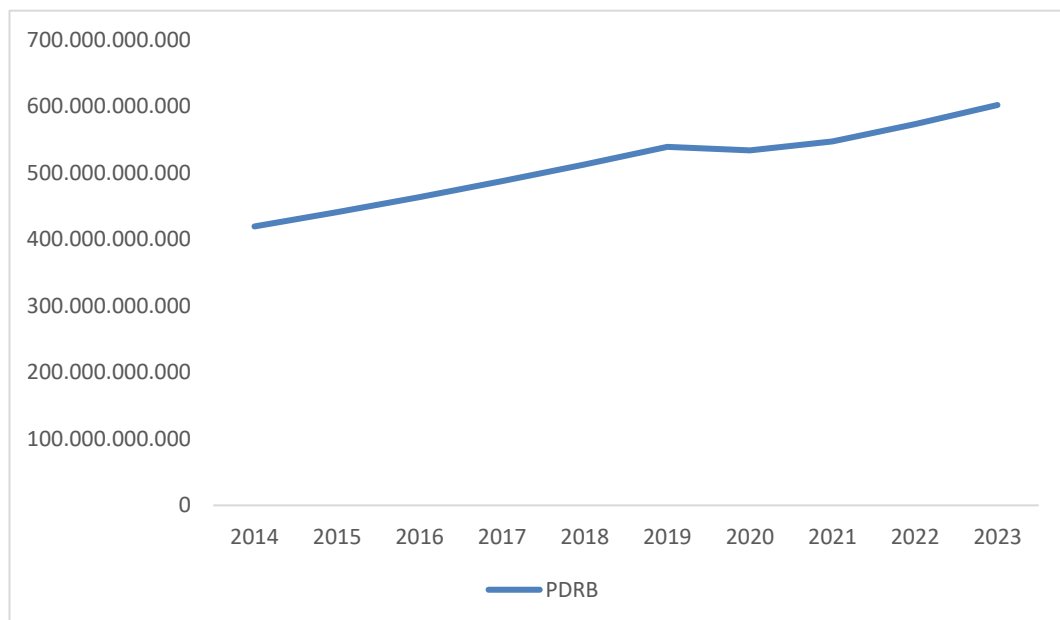
Tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam

perkonomian. Adapun indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional, sedangkan indikator pendapatan nasional yang sering digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan untuk wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Setiap daerah membutuhkan pembiayaan tidak hanya dari APBN tetapi juga dari pendapatan daerah untuk mencapai kemajuan ekonomi. kemampuan daerah dalam menyalurkan sumber daya yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bergantung pada kemampuannya untuk mengubah potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan dana bergulir untuk pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berusaha meningkatkan pelayanan publik dan berbagai industri yang berkembang menjadi sumber pendapatan asli daerah setelah mencapai kemandirian daerah. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja perkonomian. (Makawaehe, 2023)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 menunjukkan tren positif dengan tumbuh 602,2 M dibandingkan tahun 2022. Hal ini tidak lepas dari peran penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dalam mendorong aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sumatera Utara, dengan kekayaan sumber daya alam dan budayanya, memiliki potensi besar untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, realisasinya masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Di sisi lain, Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat juga menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah.

Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat pertumbuhan yang cenderung meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumatera Utara tahun 2024 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan adalah sebagai berikut (Gambar 1.1) :



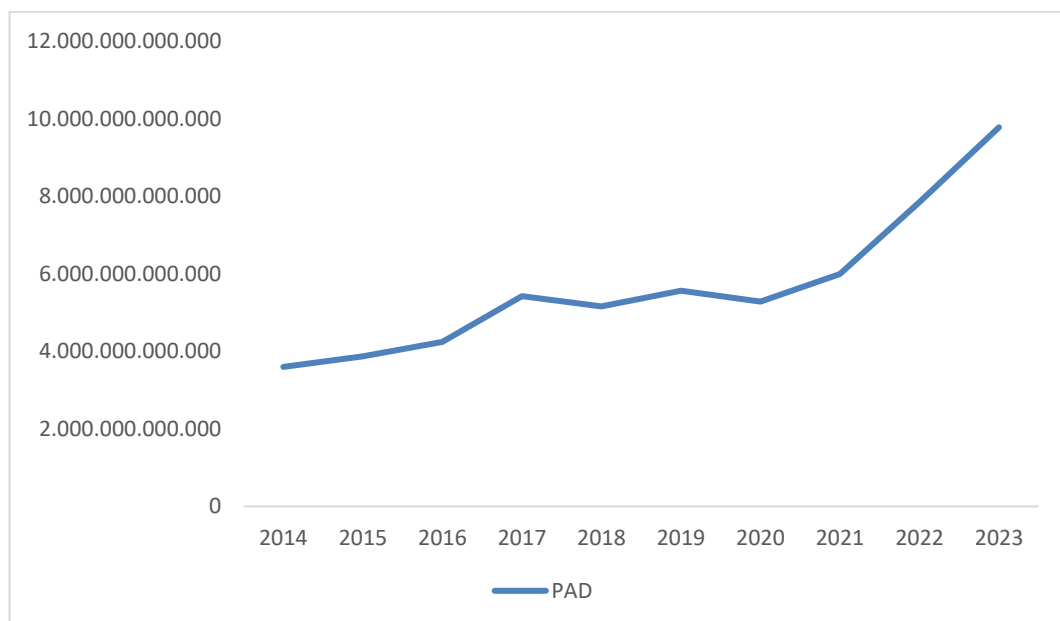
Sumber data : BPS. Sumut 2024

Gambar 1.1 PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah).

Berdasarkan pada gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang positif hampir setiap tahunnya selama periode 2014-2023. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 533,7 M yang diakibatkan pandemi COVID-19. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 602,2 M.

Peningkatan PDRB di provinsi didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian seperti kelapa sawit, karet dan tanaman pangan lainnya. Selain itu peningkatan PDRB juga didorong oleh meningkatnya investasi dan pertumbuhan sektor pariwisata.

Peningkatan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi Sumatera Utara sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktifitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya (Anjelina et al., 2019). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pendapatan Asli Daerah di provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut (Gambar 1.2) :



Sumber Data: BPS. Sumut 2024

Gambar 1.2 Grafik Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2023 (Triliun Rupiah).

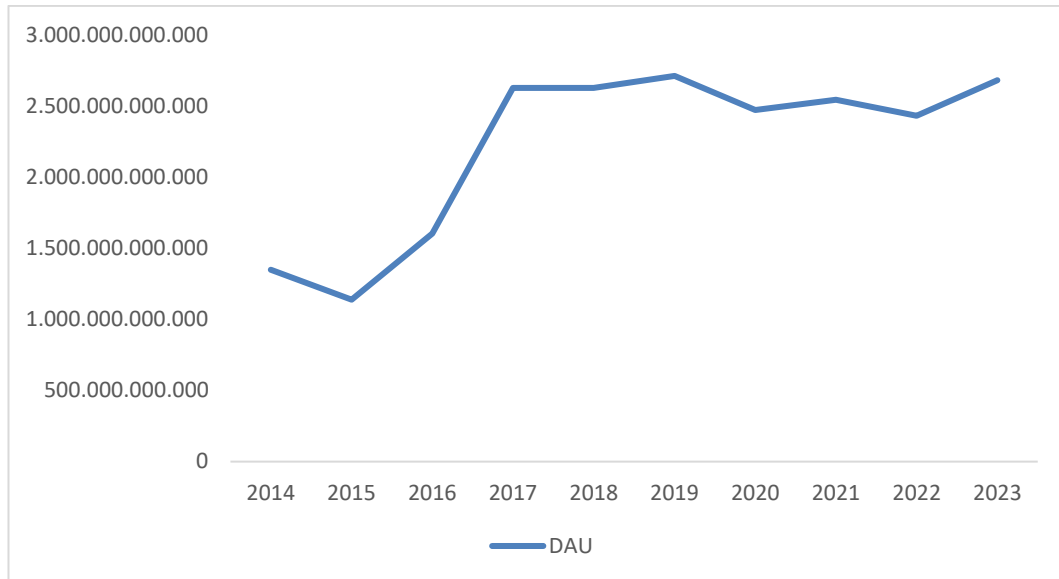
Berdasarkan Gambar 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Dimana pada tahun 2014 pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,5 triliun hingga mencapai pada tahun 2023 sebesar 9,7 triliun. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara cenderung meningkat. Meningkatnya realisasi PAD ditopang oleh besarnya pendapatan asli daerah Sumatera Utara disektor pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Dari data pendapatan asli daerah tahun 2014-2023 di provinsi Sumatera Utara yang cenderung meningkat setiap tahunnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2023. Hal ini sejalan dengan penelitian Machfud, Asnawi, Naz'aina (2021) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/ kota di provinsi Aceh, selain itu peneliti Putri Wisdayanti, Nurlina, (2022) juga menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Langkat. Namun ada beberapa penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian AlQomariah et al., (2022) bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu penelitian Etika et al.,(2022) juga mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa masih ada perdebatan diantara peneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga memotivasi penulis untuk mengkaji di provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah pusat mengeluarkan dana perimbangan yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dengan tujuan mengatasi kesenjangan infrastruktur yang terjadi di setiap daerah maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi disetiap

daerah secara merata. DAU dan DAK merupakan suatu dana yang sumbernya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) dan dibagikan setiap daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan setiap daerah dalam membiayai kebutuhan daerah untuk perwujudan desentralisasi. (Ridwan & Anis, 2021)

Menurut PP Nomor. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang didistribusikan dengan tujuan untuk meratakan keuangan antar daerah dan juga untuk membiayai segala kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum juga diartikan sebagai dana yang diberikan setiap tahun kepada pemerintah daerah yang ada di Indonesia yang dapat digunakan untuk pembangunan tiap daerah menurut kebutuhan masing-masing daerah tersebut. Menurut PP Nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diperoleh oleh tiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut yaitu: alokasi dasar, yakni jumlah PNS yang ada di daerah, jumlah penduduk yang ada di daerah, luas wilayah daerah, pendapatan daerah yang dihasilkan setiap tahunnya Putri Wisdayanti, Nurlina, (2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik dana alokasi umum di provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut (Gambar 1.3) :



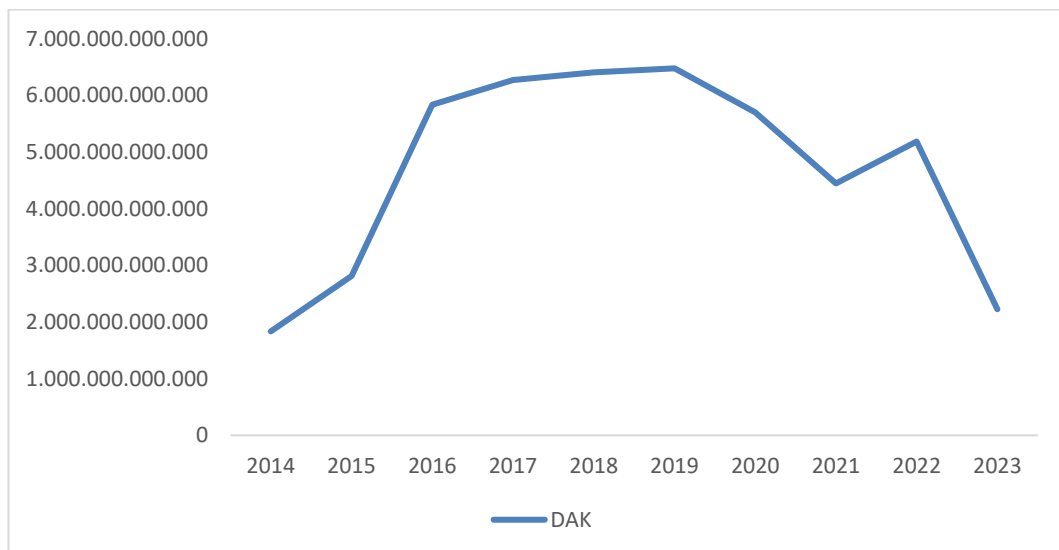
Sumber Data: BPS Sumut 2024

Gambar 1.3 Grafik Dana Alokasi Umum di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2023 (Triliun Rupiah).

Dari gambar 1.3 diatas terlihat bahwa dana alokasi umum provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif pada setiap tahunnya. Dana alokasi umum paling rendah diterima pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,1 Triliun rupiah dan yang paling tinggi diterima pada tahun 2019 sebesar 2,7 Triliun rupiah. Dari data dana alokasi umum provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2023 yang mengalami fluktuatif yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara, sehingga pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara juga mengalami fluktuatif pada tahun 2014-2023. Hal ini di sejalan dengan penelitian Sinaga et al., (2020) yang menyimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian Mokerowu et al.,(2020) juga menyimpulkan bahwa dana alokasi umum bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut UU No. 25 tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional Mokerowu et al., (2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:



Sumber Data: BPS.Sumut 2024

Gambar 1.4 Grafik Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2023 (Triliun Rupiah).

Dari gambar 1.4 diatas dapat dilihat bahwa dana alokasi khusus provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif pada setiap tahunnya. Dimana DAK mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2019 sebesar 6,4 Triliun rupiah tetapi mengalami penurunan dari tahun 2020-2023 hingga mencapai sebesar 2,2 Triliun rupiah. Dari data dana alokasi khusus provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2023 yang mengalami fluktuatif yang akan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara sehingga pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada tahun 2014-2023. Hal ini sejalan dengan penelitian Mokorowu et al., (2020) yang menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian Anjelina et al., (2019) juga menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejauh ini telah dilakukan beberapa penelitian mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Islami & Nababan, (2020) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Putra et al., (2021) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mokoginta et al., (2023) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti diantara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga melatar belakangi penulis untuk mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?

2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat didefinisikan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang
2. Mengetahui Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang
3. Mengetahui Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dapat didefinisikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mampu memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih luas kepada pembaca mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur ilmiah yang dapat berguna untuk kegiatan akademik bagi peneliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera utara.